

Ade Yasin Kembali Terpilih Jadi Ketua DPW PPP

BOGOR (IM) - Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Jawa Barat kembali menetapkan Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin sebagai Ketua DPW PPP masa bakti 2021-2026.

Ade dipilih secara aklamasi, karena menjadi satu-satunya kader yang mencalonkan diri. Acara berlangsung di Hotel Le Eminence Cianjur, Jawa Barat, Senin (29/3).

Dalam sambutannya, Ade Yasin, mengatakan, ke depan pihaknya akan mempersiapkan partai untuk bekerja ekstra dan membutuhkan orang-orang yang memang sejalan dengan partai.

"Kita siapkan partai dari orang-orang yang memang sejalan dan mau bekerja. Sehingga ke depannya partai

bisa kembali berjaya," kata Ade Yasin.

Ia menjelaskan, partai setelah ini bersiap menentukan siapa yang akan didukung dan maju dalam kontestasi politik untuk Pileg 2024 mendatang. Pihaknya akan menyiapkan workshop untuk para kader. Karena partai membutuhkan kader yang kompeten, serta mau turun untuk bekerja membangun Jawa Barat.

Workshop, kata Ade, digelar untuk pendidikan para kader dan pengurus. Karena para kader dapat mencalonkan legislatif, tapi belum tentu siap menjadi anggota legislatif.

Menurutnya, dengan adanya workshop pendidikan, dapat menciptakan kader yang siap mewujudkan kemajuan partai PPP. ● **gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



INSTRUMEN MUSIK DARI BUAH DAN SAYUR

Seniman asal Bandung, Fransisca Agustina (kanan) memainkan instrumen musik melalui media buah dan sayuran saat pertunjukan musik eksperimental di garasi rumah, Andir, Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/3). Pertunjukan musik eksperimental yang menampilkan kolaborasi antara Fransisca Agustin dengan gitaris Hinhin Agung Daryana tersebut digelar dalam rangka persiapan gelaran Bandung Art Month serta memperkenalkan alat musik elektronik, etnik dan eksperimental.



IDN/ANTARA

SEMARAK UMKM PANTURA 2021

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal M.Taufik Amrozy (kiri) meninjau stan perajin batik tegalan saat Semarak UMKM Pantura 2021 di Tegal, Jawa Tengah, Selasa (30/3). Semarak UMKM Pantura dengan tema "Pesona Te-Ko Pantura" yang diikuti pelaku usaha UMKM binaan Bank Indonesia se Jawa Tengah tersebut untuk mendorong perekomian melalui UMKM lokal binaan, memperkenalkan potensi produk daerah sekaligus mendukung pembayaran non tunai menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Disnaker Bandung Tangani 137 Perselisihan Hubungan Industrial Sepanjang 2020

BANDUNG (IM) - Sepanjang Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung menangani 137 perselisihan hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan, termasuk soal tunjangan hari raya (THR).

"Perselisihan masih ada, tahun lalu kurang lebih 137 perusahaan. Selesai juga banyak, kalau selesai biasanya ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), yang selesai 58,5 persen," kata Kadisnaker Kota Bandung Arief Syaifudin di Balai Kota Bandung, Selasa (30/3).

Ia menjelaskan, perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan antara karyawan dan perusahaan di PHI dengan perjanjian bersama (PB). Untuk perselisihan THR pun sudah selesai dengan PB. "Dari 137, itu 58,5 persen selesai dengan dibuat PB atau perjanjian bersama. THR sudah selesai dengan perjanjian," ujarnya.

Di masa pandemi Covid-19, perselisihan hubungan industrial di Kota Bandung mengalami peningkatan. Perselisihan terjadi di perusahaan yang bergerak diberbagai bidang. "Tahun 2019, 120 perselisihan, tahun kemarin naik 137 perselisihan, ada kenaikan jumlah kasus karena pandemi Covid-19 beranekaragam per-

sahaan, industri ada, hotel ada," tuturnya.

"Sampai saat ini kami terus melakukan langkah di bidang HISK (Hubungan Industrial dan Sengketa Ketenagakerjaan) untuk perselisihan tersebut. Tentunya kami menghasilkan yang namanya anjuran, kita biasanya mempersilahkan bipartit dulu antara pekerja dan perusahaan," tambahnya.

Jelang Idul Fitri 2021, pihaknya meminta jangan sampai ada perselisihan antara karyawan dan perusahaan. Perusahaan harus memenuhi kewajiban memberikan THR kepada karyawan.

"Yang pasti kita sampaikan imbuhan kepada para pengusaha untuk memenuhi apa yang jadi kewajibannya, hanya ketika terjadi permasalahan biasanya, tadi sebetulnya kedua belah pihak memahami apakah perusahaan itu betul-betul sehat atau misal perusahaan itu kolaps, nanti akan bertemu di PHI," jelasnya.

Ia menambahkan, perusahaan harus memenuhi kewajiban memberikan THR sebelum melakukan bipartit. "Yang pasti kita mengimbau sebelum bipartit penuh apa yang jadi hak dan kewajiban, kalau ada kendala harus dilakukan bipartit," ujarnya. ● **pur**

Pemda Prov Jabar Gandeng Telkom University untuk Akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BANDUNG (IM) - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat (Jabar) melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menggelar rapat lanjutan yang berkolaborasi dengan Biro Organisasi dan Telkom University pada Rapat Proses Bisnis Terintegrasi dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Acara itu berlangsung di Aston Pasteur Hotel, Senin, (29/3).

Rapat Proses Bisnis Terintegrasi dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai upaya untuk meningkatkan nilai indeks SPBE dan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat.

Kepala Bidang Tata Laksana Biro Organisasi, Heny Rahmawati menyampaikan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia.

Ia menjelaskan, proses bisnis

yang berbelit dan tumpang tindih membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja.

Proses bisnis yang belum dapat teridentifikasi didukung layanan SPBE yang lengkap, terintegrasi dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya, hasil evaluasi SPBE 2019 dan 2020, belum terdapat peta proses bisnis terintegrasi yang standar. "Untuk progres proses bisnis ini sendiri baru 60%, sementara itu untuk arsitektur SPBE belum terlalu meningkat hanya sekitar 15-20%," ujar Heny.

Ridha Hanafi dan Asti Amalia dari Telkom University yang ditunjuk sebagai narasumber memaparkan permodelan proses bisnis dan pengembangan peta proses bisnis terintegrasi Provinsi Jawa Barat untuk penyusunan arsitektur SPBE. Kepala Bidang e-Government (e-Gov) Diskominfo Jabar Dian Istanti, menjelaskan masih banyak perangkat daerah yang belum menyampaikan progress terkait proses bisnis terintegrasi di instansi masing-masing.

Dian berharap bahwa rapat ini bisa lebih efektif untuk berdiskusi lebih jauh terkait dengan proses bisnis terintegrasi dan arsitektur SPBE. ● **pur**

"Kami yakin Pertamina akan mengantisipasi dampak sosial dari kejadian ini dengan baik. Sehingga tidak ada kerugian di masyarakat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

INDRAMAYU (IM) - Kebakaran terjadi di tangki area kilang PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat (Jabar). Pemprov Jabar memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jabar aman saat Ramadan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina terkait pasokan BBM.

"Kalau pasokan BBM untuk wilayah Jawa Barat aman, termasuk pada saat umat muslim Jawa Barat

menjalani puasa di bulan suci Ramadan.

Tinggal 13 hari lagi," kata Uu kepada wartawan usai meninjau lokasi kebakaran kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Selasa (30/3).

Uu mengatakan kebakaran terjadi pada tangki, tepatnya lokasi T-301G milik RU VI Balongan. "Jadi bukan kilang, melainkan tangki. Tidak terlalu besar, tapi kita bukan menganggap ini kecil," kata Uu.

Namun ia tak bisa menjelaskan tentang kronologi dan penyebab terjadinya kebakaran. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan ke-

bakaran kepada pihak Pertamina dan terkait lainnya.

"Kami yakin Pertamina akan mengantisipasi dampak sosial dari kejadian ini dengan baik. Sehingga tidak ada kerugian masyarakat," kata Uu.

Sementara itu sebanyak 36 orang menjadi korban dalam kebakaran tangka tersebut. Rinciannya 30 orang mengalami luka ringan dan enam orang mengalami luka berat dalam insiden yang terjadi pada Senin (29/3) dini hari.

27 orang yang mengalami luka ringan telah diperbolehkan pulang. Sementara tiga orang lainnya masih menjalani perawatan di RS Bumi Patra.

"Korban luka berat sedang ditangani di RSPP Jakarta," kata Manajer PUSDalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Budiman Wahyu dalam keterangan resmi BPBD Jabar, Selasa (30/3).

Menurut Budiman, hingga Selasa kemarin pukul 11.30 WIB, kebakaran masih terjadi dan warga sekitar kilang sudah diungsikan ke GOR Kompleks Perumahan Pertamina Bumi Patra, Kompleks Islamic Center Indramayu dan Pendopo Kabupaten Indramayu.

Saat ini, terdapat 932

orang yang mengungsi ke ketiga titik pengungsian tersebut.

"BPBD Kabupaten Indramayu mendirikan posko dan dapur umum di halaman pendopo Kabupaten Indramayu," kata Budiman.

Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada korban jiwa akibat dampak dari ledakan tersebut. "Masih nihil," ucap Budiman.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah menginstruksikan BPBD Jabar agar terus melakukan evakuasi korban kebakaran kilang minyak Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu.

Selain itu, ia juga menginstruksikan agar warga aman dan tetap terhindar dari risiko tertular covid-19 di tempat pengungsian.

"Untuk keselamatan warga. Kami perintahkan agar evakuasi terus dilakukan, memindahkan warga ke tempat yang aman, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi dan tetap aman dari penularan covid. BPBD Provinsi telah turun ke lapangan dan berkoordinasi untuk bantuan.

Keselamatan warga adalah yang utama," ujar Ridwan Kamil dalam unggahan Instagramnya, Senin (29/3). ● **yan**

Bandara Kertajati Juga Akan Difokuskan untuk MRO

MAJALENGKA (IM) - Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka telah dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo. Tidak hanya itu, bandara tersebut akan difungsikan untuk perawatan pesawat.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, selain dioperasikan untuk mengangkut penumpang dan kargo, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati akan difokuskan pada Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.

"Bandara Kertajati akan difokuskan juga pada MRO, sehingga semua pesawat bisa maintenance di sana.

Kita tahu juga, bisnis bandara itu tidak hanya penumpang, ada juga kargo dan perawatan.

Tadi dibahas agar Kertajati bisnis juga pada nonpenumpang kalau kargo sudah dimulai," kata Ridwan Kamil seperti dikutip dari Antara.

Kang Emil menyebutkan, terdapat maskapai penerbangan internasional yang minat membuka MRO di Bandara Internasional Kertajati dan telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

"Juga saya laporkan ke Pak Presiden ada pihak penerbangan internasional di Asia yang juga berminat membuka MRO maskapainya di Kertajati," ujarnya.

Mantan Wali Kota Bandung ini menilai, Bandara Internasional Kertajati akan optimal beroperasi ketika Tol Cisumdawu selesai dibangun.

"Bandara Kertajati ini belum berfungsi optimal karena

Tol Cisumdawu belum selesai tapi, tadi disampaikan Menteri PUPR bahwa Desember 2021 akan terhubung," ucapnya.

Selain itu, Bandara Internasional Kertajati merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam Rebanda Metropolitan. Dari 13 kota industri baru yang akan dibangun di Rebanda Metropolitan, Kertajati direncanakan menjadi kota baru dengan konsep aercity.

"Patimbangan dengan kota maritimnya dan Kertajati dengan aercity-nya," katanya.

Rebanda Metropolitan diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di masa depan melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Menurut Ridwan, Rebanda Metropolitan diprediksi akan menyumbang satu persen pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah pusat mendukung penuh pembangunan Rebanda Metropolitan dan akan menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Cirebon-Patimbangan-Kertajati atau Kawasan Rebanda Metropolitan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) untuk pemanfaatan Bandara Internasional Kertajati sebagai MRO pesawat. ● **yy**

Kabupaten Garut Akan Menjadi Tuan Rumah FEKDI Tahun 2021

GARUT (IM) - Kabupaten Garut ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) tahun 2021. Acara itu berlangsung pada 9 April 2021 yang akan datang.

Demikian disampaikan Bupati Garut, Rudy Gunawan, dalam sambutannya di Apel Gabungan yang dilaksanakan di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (29/3) lalu.

"ETPD (atau) Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang menjadi harapan dari Bapak Presiden bahwa sekarang itu dalam era digitalisasi keuangan. Garut akan menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Keuangan Digital Daerah yang akan dilaksanakan minggu depan," kata Rudy.

Dituturkan Rudy, Presiden Joko Widodo, telah membuat Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Atas hal ini, Garut dipercaya menjadi pioner di Jawa Barat untuk P2DD dan perluasan serta percepatan digitalisasi daerah ini.

"Memang belum ada Per-

undang-Peraturan Menteri Dalam Negeri), tapi dengan Keppres No. 3 tahun 2021 telah menunjuk Bupati, Wali Kota, Gubernur, sebagai Ketua Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah. Kita harus sukseskan ini karena Alhamdulillah Garut dipercaya menjadi kabupaten yang akan menjadi pioneer di Jawa Barat," katanya.

Guna menunjang dan merealisasikan ETPD di Kabupaten Garut, Rudy menginstruksikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Garut untuk menyediakan barcode di beberapa tempat untuk mempermudah transaksi di Kabupaten Garut.

"ETPD adalah menjadi kewajiban. Saya juga instruksikan kepada Bapenda coba membuat barcode-barcode di beberapa tempat, (untuk) mempermudah pembayaran. Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dari sisi pendapatan ini akan menjadi fokus saya. Ini akan membuktikan Kabupaten Garut sebagai kabupaten yang maju sekarang. Kemajuan itu adalah dari teknologi yang mempermudah orang melakukan kehidupan. Kita ingin menuju ke arah itu," katanya.



IDN/ANTARA

BONSAI KARAKTER DARI Pohon KELAPA

Pembudidayaan merawat bonsai pohon kelapa di Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (30/3). Bonsai dari tanaman kelapa itu dibentuk menjadi berbagai macam karakter dengan modifikasi beragam bentuk seperti naga, bentuk wajah manusia, dan ayam yang dibenderol dengan harga Rp200 ribu hingga Rp500 ribu.